

KURIKULUM PESANTREN MULTIKULTURAL: Nilai-Nilai Multikultural dalam Kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan

Ahmad Sulthon

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA)

Email: achemad.sulthon@gmail.com

Abstract

This study is started from the phenomena on the values of multicultural education at Sunan Drajat boarding school. This school has inserted the multicultural values in its curriculum development either in planning, implementation, or evaluation. This study employs qualitative approach with case study design. The data was collected through (1) in-depth interviews; (2) participant observation; and (3) documentation analysis. The data analysis uses descriptive technique. The results show that first, on the curriculum planning process, there are two multicultural values namely democracy and justice values found, especially in the discussion and workshops. On the results of curriculum planning, the curriculum document contains the multicultural values such as equality and justice values. Second, the curriculum implementation has included multicultural values as depicted in the textbooks which are loaded with the value of love, humanism, solidarity and unity, and the value of justice. Third, the urgency to internalize the multicultural values in the curriculum is based on some aspects, namely, (1) the reality of pluralistic students, (2) the influence of culture and ethnicity toward the cultural development, (3) the global conflict between student's culture, (4) the effectiveness of learning about the differences, and (5) the religion related violence

Penelitian ini berawal dari fenomena nilai-nilai pendidikan multikultural yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Sunan Drajat. Pondok Pesantren ini telah memasukkan nilai-nilai multikultural dalam pengembangan kurikulum baik dalam aspek perencanaan, implementasi, maupun dalam evaluasi kurikulum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi

kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan (1) wawancara mendalam; (2) observasi berperan serta; dan (3) studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dari segi proses perencanaan kurikulum, ditemukan dua nilai multikultural yaitu nilai demokrasi dan nilai keadilan, terutama dalam musyawarah kerja dan workshop. Dari segi hasil perencanaan kurikulum, ditemukan bahwa dokumen kurikulum memuat nilai-nilai multikultural yaitu, nilai kesetaraan dan keadilan. Kedua, implementasi kurikulumnya telah memuat nilai-nilai multikultural seperti dalam buku ajar yang sarat nilai kasih sayang, humanisme, solidaritas dan kebersamaan, serta nilai keadilan. Ketiga, urgensi menginternalisasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum karena beberapa aspek, yaitu (1) realitas santri yang sangat plural, (2) pengaruh budaya dan etnisitas terhadap perkembangan budaya, (3) benturan global antar kebudayaan santri, (4) efektifitas belajar tentang perbedaan, dan (5) kekerasan atas nama agama.

Keywords: *curriculum, Islamic boarding school, multicultural values*

Pendahuluan

Realitas multikultural merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari lagi di Indonesia, melihat fakta bahwa Indonesia memiliki keberagaman etnik, budaya, bahasa, agama, gender, ras, usia dan kelas sosial. Hal senada juga diuraikan oleh Sulalah yang menyatakan bahwa Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*). Ini dapat dilihat dari sosial yang ada. Bukti kemajemukannya juga dapat dibuktikan melalui semboyan dalam lambang Negara Republik Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”. Masyarakat Indonesia yang plural, dilandasi oleh berbagai perbedaan, baik horisontal maupun vertikal. Perbedaan horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Sementara perbedaan yang bersifat vertikal yakni menyangkut perbedaan-perbedaan lapisan atas dan bawah, yang menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya (Sulalah, 2012: 1).

Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan pada pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas menilai dan kepercayaan demokratis dan melihat keragaman sosial dan interpendensi dunia sebagai bagian dari pluralisme budaya. Multikultural dan pendidikan merupakan rangkaian kata yang berisikan esensi dan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam multikulturalisme terdapat materi kajian yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan pendidikan yang keduanya sama-sama penting. Dalam pendidikan terdapat pondasi dan akar-akar kultur yang disarikan dari nilai-nilai kultur masyarakat

(Tilaar, 2007: 216-221). Wacana pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia dikemukakan oleh para pakar Indonesia sejak tahun 2000. Di antara para pakar pendidikan Indonesia yang mewacanakan itu adalah H.A.R Tilaar, Azyumardi Azra, Zamroni, M. Amin Abdullah, Abdul Munir Mulkhan, Musa Asyari, M. Ainul Yaqin dan lain sebagainya.

Wacana tersebut mereka kemukakan didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak problem tentang eksistensi sosial, etnik, dan kelompok keagamaan yang beragam (Asy'arie, 2004: 4). Dalam pandangan mereka problem tersebut disebabkan oleh adanya pengelolaan yang kurang baik terhadap keberadaan multietnik, multibudaya, dan multiagama yang ada di Indonesia. Indikatornya terlihat pada upaya penyeragaman atau sering disebut politik monokulturalisme dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa Orde Baru. Selama Orde Baru berkuasa, pemerintah mengabaikan terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, bahasa, agama maupun budaya (Azra, 2002: 2).

Pendidikan Islam baik sebagai lembaga pendidikan maupun sebagai materi, oleh para pengamat pendidikan Islam di Indonesia dikritik karena telah mempraktikkan proses pendidikan yang eksklusif, dogmatik, dan kurang menyentuh aspek moralitas. Proses pendidikan seperti ini terjadi di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, sekolah Islam, dan pesantren. Indikatornya menurut Abdul Munir Mulkhan terlihat pada: (1) terbatasnya ruang perbedaan pendapat antara guru dengan peserta didik, dan atau antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya dalam sistem pendidikan Islam, sehingga proses pembelajarannya bersifat indoktrinatif; dan (2) fokus pendidikannya hanya pada pencapaian kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, dengan materi ajar pendidikan Islam yang bersifat tunggal, yaitu benar-salah dan baik-buruk yang mekanistik (Mulkhan, 2001: 17-18).

Kurikulum merupakan salah satu komponen pokok aktivitas pendidikan, dan merupakan penjabaran dari idealisme, cita-cita, tuntutan masyarakat, atau kebutuhan tertentu. Dari kurikulum inilah diketahui arah pendidikan, alternatif pendidikan, fungsi pendidikan serta hasil pendidikan yang hendak dicapai dari aktivitas pendidikan (Muhaimin, 2009: 1). Bahkan sejumlah pakar kurikulum berpendapat bahwa jantung pendidikan berada pada kurikulum. Baik dan buruk hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum. S. Nasution mengatakan bahwa Masa depan bangsa terletak pada tangan kreatif generasi muda. Mutu bangsa di kemudian hari bergantung pada pendidikan yang dinikmati anak-anak saat ini, terutama dalam pendidikan formal yang diterima

di bangku sekolah. Apa pun yang akan dicapai di sekolah harus ditentukan oleh kurikulum sekolah. Jadi, barang siapa yang menguasai kurikulum maka ia memegang peran penting dalam mengatur nasib bangsa dan Negara ke depannya (Yamin, 2009: 12).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang pada umumnya menyelenggarakan berbagai satuan pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun madrasah juga seyogyanya menjadikan prinsip pengembangan kurikulum yang bermuatan nilai-nilai multicultural tersebut dalam kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulumnya. Ronald Alan Lukens-Bull mengklasifikasi pesantren menjadi dua macam yaitu pesantren tradisional (*salafiyah*) dan pesantren modern. Pesantren tradisional dapat dipahami sebagai pesantren yang memelihara bentuk pengajaran teks klasik dan pendidikan moral sebagai inti pendidikannya. Sedangkan Pesantren modern dapat dipahami sebagai pesantren yang mengajarkan pelajaran-pelajaran umum disamping pelajaran-pelajaran agama dan pendidikan moral (Lukens-Bull, 2004: 5-6).

Bagi pesantren tradisional, kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum merupakan hasil improvisasi dari seorang kiai secara intuitif yang disesuaikan dengan perkembangan pesantrennya (Madjid, 1997: 5-6). Dengan demikian, pengembangan kurikulum pesantren tradisional sangat ditentukan oleh seorang kiai, sehingga nilai-nilai multikultural terutama nilai demokrasi dan keadilan agaknya tidak ditemukan dalam pengembangan kurikulum pesantren tradisional. Pesantren modern (*khalafiyah*) dalam batas tertentu telah melakukan kegiatan pendidikannya berdasarkan program yang telah direncanakan oleh seorang kiai dan para pembantunya. Implementasi program pendidikan yang dilakukan juga dievaluasi demi perbaikan di masa yang akan datang (Lukens-Bull, 2004: 86-87). Dengan demikian, pengembangan kurikulum pesantren modern ditentukan oleh kiai dan para ustadz yang ada di pesantren tersebut, sehingga prinsip multikultural diasumsikan ada dalam pengembangan kurikulum pesantren modern. Itulah sebabnya, penelitian ini mengambil fokus pada model kurikulum pesantren modern, yang terdiri atas perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulumnya.

Pondok Pesantren Sunan Drajat yang terletak di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan salah satu pesantren besar di Indonesia, Alasan pemilihan Pondok Pesantren Sunan Drajat sebagai obyek penelitian ini didasarkan pada suatu fakta bahwa Pondok Pesantren Sunan Drajat telah memasukkan nilai-nilai multikultural dalam

pengembangan kurikulum baik dalam aspek perencanaan, implementasi, maupun dalam evaluasi kurikulumnya. Salah satu fakta yang dimaksud adalah adanya keterlibatan banyak pihak dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat. Keterlibatan banyak pihak ini memungkinkan adanya muatan nilai-nilai multikultural dalam perencanaan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat (Moch. Akhsan: hasil wawancara, 10 Juni 2014).

Keberadaan nilai-nilai multikultural dapat dilihat di Pondok Pesantren Sunan Drajat, nilai multikultural yang dimaksud adalah nilai keadilan dan kesetaraan. Perhatian terhadap nilai-nilai multikultural tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah santri yang mencapai 5.000 santri dengan latar belakang daerah, budaya dan bahasa yang beragam. Jika latar belakang daerah asal santri tersebut tidak dikelola dengan memperhatikan nilai keadilan dan nilai kesetaraan, maka akanberpotensi terjadi konflik.. Sebagian santri yang belajar di pesantren ini ada yang berasal dari pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, NTB dan lain-lain. Sejumlah santri ada yang berasal dari luar negeri, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Pada tahun pelajaran 2012/2013, Pondok Pesantren Sunan Drajat memiliki jumlah santri sebanyak 4.239 baik putra maupun putri. Dari data ini,peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kurikulum Pesantren Multikultural (Melacak Muatan Nilai-Nilai Multikultural dalam Kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan)”

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan kajian dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan utama: “Bagaimana kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan jika dilihat dalam perspektif multikultural, baik dari aspek perencanaan, implementasi dan urgensi penerapan pendidikan multikultural di Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan”. Merujuk dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengungkap perencanaan, implementasi kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan dan nilai-nilai multikultural yang terkandung di dalamnya serta urgensi penerapan pendidikan multikultural di Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan.

Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap khazanah pengetahuan tentang model kurikulum pondok pesantren yang memuat nilai-nilai multikultural baik dalam aspek

perencanaan, implementasi, maupun urgensi implementasi kurikulum pesantren berbasis nilai-nilai multikultural. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi Pengasuh, Pengurus Yayasan, Pengurus Pondok, para kepala madrasah dan para ustad di lingkungan Pondok Pesantren Sunan Drajat, serta pengelola pondok pesantren pada umumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan bersifat kualitatif. Dikatakan kualitatif, karena karena penelitian ini lebih menekankan pada proses-proses aktifitas sosial yang terjadi di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan, terutama proses yang terkait dengan kegiatan perencanaan kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Adapun model penelitian ini adalah studi kasus (*case studi*). Alasan menggunakan studi kasus, karena penelitian ini dilakukan mengenai studi kasus yang terkait dengan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan yang terdapat kesatuan sistem berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu.

Kurikulum Pesantren

Sebelum penulis menguraikan tentang kurikulum pesantren terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu kurikulum dan apa itu pesantren. Secara *etimologi* kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Curis*, yang artinya pelari dan *Curer* yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari (Iskandar, 2009: 143). Istilah kurikulum kemudian berkembang, hingga akhirnya kurikulum dapat dipahami sebagai landasan yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental. Secara sempit, arti kurikulum pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh ijazah (Hamalik, 1990: 4).

Menurut penulis dalam pengertian yang terbatas seperti ini, kurikulum terlihat seperti dirumuskan dari segi tradisionalnya saja atau menurut pandangan lama. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, kurikulum dalam pendidikan tidak hanya sekedar atau terbatas pada materi yang akan diberikan di dalam ruang kelas, melainkan juga meliputi apa saja yang sengaja

diadakan atau ditiadakan untuk dialami peserta didik di sekolah (Iskandar, 2009: 142). Oleh sebab itulah mengapa posisi kurikulum menjadi mata rantai yang urgen dan tidak dapat begitu saja dinafikan dalam konteks peningkatan kualitas lembaga pendidikan.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, kurikulum merupakan perangkat pembelajaran yang dapat menjadi indikator dalam proses dan menilai belajar mengajar (Pembelajaran). Keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang ditawarkan dan dikembangkan dalam kurikulum sebenarnya sangat tergantung dari media, strategi serta metode pembelajaran. Jadi, esensi dari kurikulum ialah program, yakni program dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan ini ditetapkan oleh berdasarkan kehendak manusia. Setiap manusia menghendaki terwujudnya manusia yang baik. Jadi, kurikulum harus berupa program untuk mengembangkan manusia agar menjadi “manusia yang baik” yang menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta yang bertanggung jawab (Muhaimin, 2012: 1)

Pengertian pesantren berasal dari kata Santri dengan awalan *pe* di depan dan akhiran *an* berarti tempat tinggal para santri di Indonesia istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Lain halnya dengan pesantren, pondok berasal dari bahasa arab *funduq* yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana (Hasbullah, 1996: 138). Pengertian secara etimologis tersebut mengidentifikasi bahwa secara kultural pesantren lahir dari budaya Indonesia, secara Historis pesantren tidak hanya mengandung makna ke Islaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia. Sebab, memang cikal bakal lembaga pesantren sebenarnya sudah ada pada masa Hindu-Budha, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan, dan mengIslamkannya (Majid, 1985: 3).

Pendapat serupa juga dapat dilihat dalam penelitian Karel A. Steenbrink yang mengemukakan bahwa Secara terminologis dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren, dilihat dari segi bentuk dan sistemnya, berasal dari India, Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk dan tersebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam (Steenbrink, 1994: 20-21).

Bisa dilihat dari sistem pengajaran yang diterapkan di dunia pesantren, memang terdapat kemiripan dengan tata laksana pengajaran dalam ritual keagamaan Hindu, dimana terdapatnya penghormatan yang besar oleh murid

(santri) kepada kiaiinya. Sehubungan dengan hal ini Cak Nur menggambarkan, kiai duduk di atas kursi yang dilandasi bantal dan para santri duduk mengelilinginya. Dengan cara begini timbul sikap hormat, dan sopan oleh para santri terhadap kiai seraya dengan tenang mendengarkan uraian-uraian yang disampaikan kiaiinya (Majid, 1997: 63). Sehingga peran kiai sangat fenomenal dan signifikan dalam keterlangsungan atau eksistensi sebuah pesantren, sebab kiai adalah sebuah elemen dari beberapa elemen dasar sebuah pesantren.

Istilah kurikulum tidak ditemukan dalam kamus besar sebagian pesantren, terutama pada masa sebelum perang. Walaupun materinya ada didalam praktek pengajaran, bimbingan rohani dan pelatihan kecakapan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Ini disebabkan karena memang pondok pesantren lama mempunyai kebiasaan untuk tidak merumuskan dasar dan tujuan pendidikannya secara eksplisit, ataupun meruncingkan secara tajam dalam bentuk kurikulum dengan rencana pelajarannya dan masa belajarnya. Sebelum penulis menguraikan tentang kurikulum pesantren terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu kurikulum.

Hal itu terbawa oleh sifat kesederhanaan pesantren, dimana kiai mengajar dan santri belajar, semata-mata untuk *ibadah lillahi ta'ala* dan tidak pernah dihubungkan dengan tujuan tertentu dalam lapangan penghidupan dan tingkat dan jabatan tertentu dalam hirarki sosial atau birokrasi kepegawaian. Kalaupun ada target yang akan dicapai maka satu-satunya adalah tercapainya *title* MMAS (Mukim, Muslim, Alim, Shalih). Adapun mata pelajaran sebagian besar pesantren terbatas pada pemberian ilmu yang secara langsung membahas masalah *'aqidah, syari'ah*, dan bahasa Arab dengan ilmu alatnya seperti: *nahwu, sharaf, bayan, ma'ani, badi'*, dan *arudl, tharikh, mantiq, dan tasawuf*. Dua materi terakhir ini biasanya diberikan pada pengajian tingkat lanjutan. Ada pula pesantren yang memberikan ilmu falak secara mendalam. Karena kiai adalah tokoh pokok dalam pesantren, maka masing-masing pesantren memiliki keistimewaan sendiri-sendiri dalam bidang tertentu sesuai dengan keahlian masing-masing (Wahid, 1988: 86).

Kurikulum pesantren sebenarnya meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan di pesantren selama sehari semalam (yang saat itu belum dirumuskan). Di luar pelajaran banyak kegiatan yang bernilai pendidikan dilakukan di pondok berupa latihan hidup sederhana, mengatur kepentingan bersama, mengurus kebutuhan sendiri, latihan bela diri, ibadah yang tertib dan *riyadlah*. Di pondok lama, para santri sendiri yang mendirikan pondok baik dalam pembiayaan dan penukangnya (meskipun dibantu oleh tukang ahli), menanak nasi sendiri,

mencuci pakaian dan mengatur kamar sendiri, mengatur keuangan sendiri bahkan ada santri yang membiayai dirinya sendiri dengan mengambil upah membantu masyarakat bertani atau membantu kiai dan kawan pesantrennya. Kehidupan dipesantren diatur oleh santri sendiri dengan aturan yang dibuat sendiri dan iuran yang ditetapkan sendiri. Hal ini yang penting, di pesantren biasanya para santri melakukan ibadah dengan tertib dan *khusu'*, bahkan tidak sedikit yang melakukan *riyadlah* atas kehendak sendiri (Wahid, 1988: 87).

Pendidikan Multikultural

Secara sederhana *multikulturalisme* berarti “keberagaman budaya” (Anshori LAL, 2010: 134). Secara etimologis, *multikulturalisme* dibentuk dari kata *multi* (banyak), *cultur* (budaya), dan *isme* (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu tergantung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik (Mahfud, 2010: 75). Secara sederhana *multikulturalisme* berarti “keberagaman budaya”. Sebenarnya ada tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari keberagaman tersebut baik keberagaman agama, ras, bahasa dan budaya yang berbeda-beda yaitu pluralitas (*plurality*), Keberagaman (*diversity*), dan multikultural (Anshori LAL, 2010: 134). Secara sederhana pula dapat diartikan sebagai pengakuan atas pluralisme budaya (Tilaar, 2004: 195). *Pluralism* budaya bukanlah sesuatu yang *given* tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam suatu komunitas. Walaupun pengertian kultur sedemikian beragam, tetapi ada beberapa titik kesamaan yang mempertemukan keragaman definisi yang ada tersebut.

Multikulturalisme di satu pihak merupakan yang menawarkan suatu paham dan pihak lain merupakan suatu pendekatan yang menawarkan paradigma kebudayaan untuk mengerti perbedaan-perbedaan yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat kita dan dunia. Perbedaan bila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan konflik, yang bahkan akhir-akhir ini menjadi kenyataan. Salah satu syarat agar sikap multikultural efektif adalah bila kita mau menerima kenyataan bahwa manusia bukan makhluk sempurna, manusia adalah makhluk yang selalu menjadi. Padahal agar dapat menjadi, manusia membutuhkan sesama (Ujan dkk, 2009: 15-17).

Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan pada pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas menilai dan kepercayaan demokratis dan melihat keragaman sosial dan interpendensi dunia sebagai bagian dari pluralisme budaya. Multikultural dan pendidikan merupakan rangkaian

kata yang berisikan esensi dan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam multikulturalisme terdapat materi kajian yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan pendidikan yang keduanya sama-sama penting. Dalam pendidikan terdapat pondasi dan akar-akar kultur yang disarikan dari nilai-nilai kultur masyarakat (Tilaar, 2004: 216-221).

Pendidikan multikultural merupakan strategi pembelajaran yang menjadikan latar belakang budaya siswa yang bermacam-macam digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan pembelajaran siswa dikelas dan lingkungan sekolah. Hal ini dirancang untuk menunjang dan memperluas konsep-konsep budaya, perbedaan, kesamaan, dan demokrasi (Tilaar, 2004: 142). Adapula yang mengatakan pendidikan multikultural adalah sebuah ide atau konsep sebuah gerakan pembaharuan pendidikan dan proses. Konsep ini muncul atas dasar bahwa semua siswa, tanpa menghiraukan jenis, dan statusnya, punya kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah formal.

Pendidikan multikultural lahir sejak 30 silam, yaitu sesudah Perang Dunia II dengan lahirnya banyak negara dan perkembangannya prinsip-prinsip demokrasi (Tilaar, 1999:16). Pandangan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia dalam praktik kenegaraan belum dijalani sebagaimana mestinya. Lambang Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna keragaman dalam kesatuan ternyata yang ditekankan hanyalah kesatuannya dan mengabaikan keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru menunjukkan relasi masyarakat terhadap praktek hidup kenegaraan tersebut. Ternyata masyarakat kita ingin menunjukkan identitasnya sebagai masyarakat bhineka yang selama Orde Baru telah ditindas dengan berbagai cara demi untuk mencapai kesatuan bangsa. Demikian pula praksis pendidikan sejak kemerdekaan sampai era Orde Baru telah mengabaikan kekayaan kebhinnekaan kebudayaan Indonesia yang sebenarnya merupakan kekuatan dalam suatu kehidupan demokrasi (Tilaar, 1999: 166).

Sejak jatuhnya presiden Suharto dari kekuasaannya, yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut era Reformasi, Indonesia mengalami disintegrasikan, krisis moneter, ekonomi, politik dan agama yang mengakibatkan terjadinya krisis kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Pada era Reformasi pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan yang memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu. Dengan kata lain pendidikan multikultural belum dianggap penting walaupun realitas kultur dan agama sangat beranekaragam (Ibrahim, 2008: 116).

Era reformasi, membawa angin demokrasi sehingga menghidupkan kembali

wacana pendidikan multikultural sebagai kekuatan dari bangsa Indonesia. Dalam era Reformasi ini, tentunya banyak hal yang perlu ditinjau kembali. Salah satunya mengenai kurikulum di sekolah kita dari semua tingkat dan jenis, apakah telah merupakan sarana untuk mengembangkan multikultural. Selain masalah kurikulum juga mengenai otonomisasi pendidikan yang diberikan kepada daerah agar pendidikan merupakan tempat bagi perkembangan kebhinekaan kebudayaan Indonesia (Tilaar, 1999: 16).

Nilai-Nilai Multikultural dalam Perencanaan Kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat

Terkait dengan perencanaan program kurikulum, Ahmad Ulul Azmi menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Sunan Drajat mempunyai tradisi untuk merencanakan program kurikulum dalam bentuk musyawarah kerja dan diskusi kelompok. Musyawarah kerja yang dikoordinasikan oleh unit kurikulum dari bidang pendidikan ini dijadikan sebagai sarana untuk merumuskan draf program dan kurikulum yang akan dikembangkan. Bahan yang dibahas dalam musyawarah kerja ini bersumber dari kurikulum Departemen Agama dan beberapa model kurikulum dari beberapa pondok pesantren seperti kurikulum Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah Kranji Paciran Lamongan, kurikulum Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik, kurikulum Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban, dengan mendasarkan pada visi, misi, dan asal usul daerah santri (Ahmad Ulul Azmi: hasil wawancara, 14 Juni 2014).

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah kerja ini adalah unsur dari yayasan, pengurus pondok pesantren, dan beberapa pendidik yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan kurikulum. Di sinilah, para peserta musyawarah kerja, memeras pikiran untuk menyusun draf program pendidikan dan kurikulum. Setiap peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapat pada forum musyawarah kerja. Dalam rangka memenuhi kewajiban dan memperoleh hak tersebut, suasana tegang dan canda tawa terkadang menghiasi perjalanan musyawarah. Adapun produk dari musyawarah kerja ini adalah draf program pendidikan dan kurikulum yang dijadikan rujukan untuk melaksanakan program dan aktifitas pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Drajat (Ahmad Ulul Azmi: hasil wawancara, 04 Agustus 2014).

Pengembangan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat didasarkan pada tiga hal, yaitu: (1) visi dan misi, (2) asal usul daerah santri, (3) minat, bakat, dan keahlian santri. Aspek asal usul daerah santri dipertimbangkan dalam

pengembangan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat, dapat dilihat dari keberadaan organisasi-organisasi perkumpulan daerah yang memberikan ruang ekspresi bagi para santri yang berasal dari daerah yang sama, baik ekspresi yang terkait dengan bahasa, adat istiadat, maupun budaya. Sementara itu, aspek minat, bakat, dan keahlian santri dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat dapat dilihat dari keragaman satuan pendidikan yang diselenggarakan: Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Muallimin Muallimat (MMA), dan Sekolah Tinggi Raden Qosim (STAIRA). Keragaman jenis program pendidikan yang ada pada satuan pendidikan seperti program kelas reguler, program kelas unggulan, program kelas khusus agama menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek minat, bakat, dan keahlian para santri dalam pengembangan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat.

Menurut perspektif teori kurikulum, ketiga dasar pengembangan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat tersebut dalam batas tertentu sesuai dengan dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar psikologis. Ketiga dasar pengembangan kurikulum tersebut jika dilihat dari perspektif multikultural memuat 2 (dua) nilai multikultural, yaitu: nilai toleransi dan nilai keragaman. Nilai toleransi bisa dilihat dari ketidak munculnya konflik dan kekerasan antar santri yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Padahal kalau ditilik secara seksama, keragaman santri sangat rentan dengan konflik. Oleh karena itu, kebutuhan akan pengakuan, apresiasi, dan kemampuan untuk menghormati terhadap perbedaan menjadi sangat penting dalam rangka meminimilisir atau bahkan menghindari konflik. Sementara itu, nilai keragaman bisa dilihat keberadaan unit pendidikan dan program-program pendidikan yang banyak sehingga memberikan kebebasan siswa untuk memilih, memilah, dan menentukan bakat dan keahliannya masing-masing. Kedua nilai multikultural tersebut dijadikan dasar untuk memposisikan Pondok Pesantren Sunan Drajat pada posisi tengah di antara golongan, aliran, dan madzab yang beragam. Posisi tengah lazim disebut ungkapan “berdiri di atas semua golongan”. Hal ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Sunan Drajat dikembangkan dengan visi yang inklusif dan terbuka agar pesantren ini dapat membekali para santri untuk membangun hubungan sosial dan harmonis dengan lingkungannya, yaitu: pemerintah, umat Islam, masyarakat luas, dan pemeluk non Islam.

Kedua nilai multikultural dan posisi tengah di atas berimplikasi pada

model perencanaan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat, baik dari segi proses maupun produknya. Jika dilihat dari segi prosesnya, perencanaan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat dilakukan dengan musyawarah kerja dan diskusi kelompok yang diawali dengan penyusunan draf perencanaan kurikulum. Adapun yang terlibat dalam penyusunan draf kurikulum ini adalah unsur yayasan, kepala madrasah, kepala pondok, ketua bidang pendidikan pondok, dan dewan *asyatidz*. Jika dilihat dari perspektif multikultural, dapat dikatakan bahwa model proses perencanaan kurikulum yang terdapat di Pondok Pesantren Sunan Drajat mengandung nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai multikultural tersebut adalah demokrasi dan keadilan. Nilai demokrasi bisa dilihat dari proses perencanaan kurikulum yang melibatkan beberapa peserta dari berbagai unsur di Pondok Pesantren Sunan Drajat. Nilai keadilan dapat dilihat dari pemberian hak yang sama dalam menyampaikan pendapat pada waktu proses perencanaan kurikulum baik dari unsur yayasan, pengurus pondok, dan dewan *assatidz* sehingga tercipta iklim yang demokratis, menyenangkan, dan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, produk perencanaan kurikulum yang terdapat di Pondok Pesantren Sunan Drajat jika dilihat dari perspektif multikultural, dapat dikatakan mengandung nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai multikultural yang terdapat dalam produk perencanaan adalah nilai kesetaraan dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Pondok Pesantren Sunan Drajat yang memberikan peluang setara dan adil kepada semua santri untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuan intelektualitas yang dimiliki mereka, tanpa membedakan asal usul daerah mereka.

Nilai-Nilai Multikultural dalam Implementasi Kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat

Implementasi kurikulum di lingkungan Pondok Pesantren Sunan Drajat jika dilihat dari perspektif multikultural ternyata telah memuat nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai multikultural, antara lain, terdapat dalam materi ajar yang disampaikan kepada peserta didik di Pondok Pesantren Sunan Drajat, yaitu: nilai soidaritas dan kebersamaan, nilai kasih sayang dan memaafkan, humanisme, dan nilai keadilan. Tabel 1 menggambarkan muatan nilai-nilai multikultural dalam materi pokok yang diajarkan pada kurikulum Pondok Pesantren Sunan Sunan Drajat mulai tingkatan *Wustha'* sampai tingkatan *Ulya*.

Tabel 1: Keberadaan Muatan Multikultural dalam Kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat

No	Nilai Multikultural	Mata Pelajaran	Materi pokok	Unit Pendidikan	Kelas
1	Kasih sayang	Fiqh	Zakat	Wustha	1
				Ulya	1
		Akhlak	Adab bersedekah	Wustha	1
				Ulya	1
				Mengasihi dan berharap kebaikan	Wustha
				Ulya	3
Hadits	Mencintai milik orang lain seperti milik sendiri	Wustha	1		
		Ulya	1		
2	Humanisme	Fiqh	Memerdekakan budak	Wusta	2
				Ulya	2
		Hadits	Hukum-hukum Ariyah	Wustha	3
				Ulya	3
				Menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan	Wustha
		Ulya	1		
3	Solidaritas dan kebersamaan	Akhlak	Kejujuran dalam berteman	Wustha	1
				Ulya	1
		Fiqh	Jual beli	Wustha	1
				Ulya	1
Syirkah		Wustha	3		
		Ulya	3		
4	Keadilan	Fiqh	Hukum-hukum fara'id	Wustha	3
				Ulya	3

Sumber: Diolah dari kitab yang digunakan dalam pembelajaran di Pondok Pesantren Sunan Drajat

Selain dalam materi ajar, nilai-nilai multikultural juga ditemukan dalam aspek tempat pembelajaran. Pada aspek ini, guru dalam pemilihan tempat pembelajaran sering mempertimbangkan aspirasi dan usul para peserta

didik. Guru yang bijak mengalihkan tempat pembelajaran di luar kelas, yaitu: halaman, perpustakaan, masjid, dan tempat-tempat yang lain karena usul dan permintaan para peserta didik. Tempat-tempat kegiatan pembelajaran tersebut, menurut pengakuan para guru, dipilih berdasarkan kebutuhan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, mereka memerlukan pemulihan tenaga yang lelah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Secara psikologis, mereka menginginkan tempat pembelajaran yang menyenangkan dan mengesankan. Hal ini menunjukkan bahwa para guru memiliki sikap yang demokratis untuk pemilihan tempat kegiatan pembelajaran. Dari sikap demokratis para guru tersebut berimplikasi pada terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan.

Sikap demokratis guru yang ditunjukkan dalam interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sikap demokratis mereka teramati dari peluang yang diberikan kepada peserta didik untuk membentuk kelompok, mengajukan pertanyaan, dan mempresentasikan materi kepada sesama peserta didik. Peluang untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran ini diberikan secara adil kepada semua peserta didik tanpa melihat asal usul daerah mereka. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan para guru terhadap keberadaan dan kemampuan semua peserta didik. Sikap mengakui dan menerima keberadaan para peserta didik ini merupakan salah satu ciri pendidikan multikultural. Di pihak lain, pengakuan para guru tersebut berdampak positif bagi terciptanya rasa percaya diri pada diri mereka. Sikap mengakui keberadaan dan kemampuan mereka tersebut menunjukkan bahwa para guru memiliki filosofi mengajar yang relevan dengan kebutuhan psikologis mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung menyukai para guru yang komunikatif, demokratis, dan adil pada saat mereka mengelola proses pembelajaran baik didalam kelas maupun diluar kelas.

Lebih jauh, dimensi multikultural pada penggunaan metode pembelajaran dapat ditemukan dari keragaman metode pembelajaran yang digunakan, seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktik. Selain itu, dapat juga teramati dari suasana apresiasif dan sikap saling mendukung yang terbangun dalam proses pembelajaran. Suasana apresiasif dapat dilihat dari cara guru pada saat meminta peserta didik untuk bertepuk tangan atas keterlibatan peserta didik lain dalam proses pembelajaran. Sikap saling mendukung dapat diteramati dari kemauan peserta didik untuk bergabung dalam kelompok kecil guna melakukan tugas kelompok atau diskusi kelompok. Suasana apresiatif dan sikap saling mendukung merupakan salah satu syarat untuk mencapai

keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kemauan para guru untuk membangun suasana apresiatif dan sikap saling mendukung tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki keterampilan sosial yang memadai. Hal ini merupakan salah satu ciri pendidikan multikultural yang ketiga, yaitu “mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya”.

Sementara itu, nilai multikultural yang terdapat dalam evaluasi pembelajaran adalah nilai keragaman. Artinya, evaluasi pembelajaran di Pondok Pesantren Sunan Drajat menggunakan beragam jenis evaluasi. Jika dilihat dari pelaksanaannya, ada tiga jenis evaluasi pembelajaran, yaitu: ulangan umum *middle* semester, ulangan umum semester, dan ulangan harian. Jenis evaluasinya juga beragam, yaitu: tes lisan, tes tulis, tes tugas, tes lembar kerja. Keragaman bentuk tes ini memberi peluang kepada para peserta didik untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan kontekstual.

Urgensi Implementasi Kurikulum Pesantren Berbasis Nilai-Nilai Multikultural di Pondok Pesantren Sunan Drajat

Pendidikan multikultural dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Hal ini disebabkan karena corak Islam sendiri bersifat plural, seperti keberadaan organisasi sosial keagamaan, budaya lokal, madzhab atau paham, dan lain sebagainya yang sering kali memicu konflik dan kekerasan yang merugikan semua pihak. Dalam upaya menjembatani muncul sikap fanatisme yang berlebihan terhadap beberapa aspek tersebut diperlukan mediator, dalam hal ini adalah pendidikan multikultural merupakan pilihan yang tepat. Pendidikan multikultural mengajarkan untuk menghargai setiap perbedaan, menanamkan sikap saling menghargai, memelihara saling pengertian, keterbukaan dalam keragaman etnik, kultur dan agama (Baidhawiy, 2005: 30-31).

Menurut M. Amin Abdullah ada beberapa kelemahan pelaksanaan pendidikan di sekolah atau madrasah, yaitu: (1) pendidikan agama lebih banyak terkonsentrasi kepada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis, (2) pendidikan agama kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu diinternalisasi dalam diri peserta didik lewat berbagai cara, media, dan forum, (3) isu kenakalan remaja, perkelahian di antara para pelajar, tindakan kekerasan, premanisme, *white color crime*, konsumsi miras, dan sebagainya, walaupun tidak secara langsung, memiliki kaitan dengan metodologi pendidikan agama yang selama ini berjalan secara konvensional-tradisional, (4) metodologi pendidikan agama

tidak kunjung berubah antara *pra dan post* era modernitas, (5) pendidikan agama lebih menitikberatkan pada aspek korespondensi-tektual, yang lebih menekankan hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada, dan (6) dalam sistem evaluasi, bentuk-bentuk soal ujian agama Islam menunjukkan prioritas utama pada kognitif dan jarang pertanyaan tersebut mempunyai bobot muatan “nilai” dan “makna” spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari (Mul Khan, 1998: 65).

Sebagai alasan utama mengapa kemudian kurikulum pendidikan multikultural harus diintegrasikan dalam kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan karena beberapa aspek, yaitu pertama, realitas santri yang sangat plural hal itu bisa dilihat dari asal usul daerah santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Sunan Drajat, kedua pengaruh budaya dan etnisitas terhadap perkembangan budaya, ketiga benturan global antar kebudayaan santri, keempat, efektifitas belajar tentang perbedaan, dan kelima, kekerasan atas nama agama, isu saling mengkafirkan antarkelompok pengikut agama, tuduhan tidak selamat jika menganut agama di luar yang dianut, saling murtad-memurtadkan, dan keberadaan orang lain diposisikan sebagai ancaman masih sering dijumpai di dalam praktik pendidikan agama baik secara terang-terangan maupun secara halus.

Kekerasan atas nama agama sering terjadi di Indonesia ini adalah akibat ekspresi keberagaman yang kurang tepat dalam masyarakat kita, seperti ekspresi keberagaman yang bersifat eksklusif dan monolitik serta fanatisme untuk memonopoli kebenaran secara keliru. Celakanya, ekspresi keagamaan seperti ini merupakan hasil dari pesantren. Pesantren dipandang masih banyak memproduksi manusia yang memandang golongan lain sebagai musuh. Maka dari sini perlu menampilkan pesantren yang fokusnya adalah bukan semata kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, melainkan juga akhlak sosial dan kemanusiaan. Pesantren merupakan sarana yang sangat efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai pendidikan multikultural pada santri. Perbedaan di antara peserta didik bukan penghalang untuk bisa bergaul dan bersosialisasi diri. Justru perbedaan itu bisa dijadikan sarana untuk menggali dan menemukan nilai-nilai etis agama dan mengenal tradisi orang lain.

Urgensi mengintegrasikan Pendidikan multikultural ke dalam kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat disebabkan karena pendidikan multikultural sebagai pendidikan yang menghargai perbedaan yang ada pada setiap individu ataupun kelompok tertentu sebagai sarana mengantisipasi terjadinya konflik antar santri yang berasal dari daerah berbeda. Pendidikan

multikultural membekali para santri untuk memahami inklusifitas, toleransi, dan menghargai keanekaragaman sehingga tercipta kerukunan sesama santri. Pendidikan multikultural ini diperuntukkan bagi semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang etnisitas, agama, dan kebudayaan. Adapun tujuan dari internalisasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam Pondok Pesantren Sunan Drajat adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap bahasa, tradisi dan budaya yang berbeda.

Secara khusus Ustad Abdul Halim mengemukakan sebagai berikut: Untuk mengantisipasi terjadi gesekan antar santri, dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Drajat terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasi baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya (Abdul Halim: Hasil wawancara dengan, 24 Agustus 2014).

Simpulan

Dari serangkaian uraian yang telah dikaji dan dianalisis dapat disimpulkan tiga hal sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut

Dari segi proses perencanaan kurikulum, ditemukan dua nilai multikultural yaitu nilai demokrasi dan nilai keadilan, terutama dalam musyawarah kerja dan workshop. Dari segi hasil perencanaan kurikulum, berdasarkan analisis ditemukan bahwa dokumen kurikulum tersebut memuat nilai-nilai multikultural. Dua nilai multikultural yaitu, nilai kesetaraan dan keadilan.

Berdasarkan analisis ditemukan bahwa implementasi kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat telah memuat nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai multikultural, antara lain, terdapat dalam buku ajar yang digunakan di Pondok Pesantren Sunan Drajat, yaitu: (1) nilai kasih sayang, (2) nilai humanisme, (3) nilai solidaritas dan kebersamaan, (4) nilai keadilan. Nilai multikultural lain seperti: (1) nilai demokrasi dan (2) nilai keragaman, juga ditemukan dalam kegiatan pembelajaran.

Urgensi menginternalisasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat karena bebrapa aspek, yaitu pertama, realitas santri yang sangat plural hal itu bisa dilihat dari asal usul daerah santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Sunan Drajat, kedua pengaruh budaya

dan etnisitas terhadap perkembangan budaya, ketiga benturan global antar kebudayaan santri, keempat, efektifitas belajar tentang perbedaan, dan kelima, kekerasan atas nama agama, isu saling mengkafirkan antarkelompok pengikut agama, tuduhan tidak selamat jika menganut agama di luar yang dianut, saling murtad-memurtadkan.

Daftar Pustaka

- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- Hamalik, Oemar. 1990. *Pengembangan Kurikulum (Dasar-Dasar) dan Pengembangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Iskandar. 2009. *Psikologi Pendidikan Sebuah Orentasi Baru*. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press.
- Ibrahim, Ruslan. 2008. Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama. *Jurnal Pendidikan Islam El Tarbawi*. Volume 1. Nomor 1.
- LAL, Anshori. 2010. *Transformasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Lukens-Bull, Ronald Alan. 2004. *Jihad ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika*. Yogyakarta: Gama Media.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Mahfud, Choirul. 2010. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin. 2009. *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulkan, Abdul Munir. 1994. *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam*. Yogyakarta: Sipsess.
- Mulkan, Abdul Munir, dkk. 1998. *Relegiusitas Iptek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mulkhan, Abdul Munir. 2001. Humanisasi Pendidikan Islam dalam Tashwirul Afkar. *Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*. Volume 1. Nomor 11.
- Nasution, S. 2003. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kultur Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Sudjana, Nana. 1991. *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Rosda Karya.
- Sudjana, Nana. 1996. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru.
- Sulalah. 2012. *Pendidikan Multikultural Dialektika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*. Malang: UIN MalikiPress.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ujan, Andre Ata dkk. 2009. *Multikulturalisme Belajar Hidup dalam Perbedaan*. Jakarta Barat: PT. Indeks.
- Wahid, Abdurrahman. 1988. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Yamin, Moh. 2009. *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press.